



## Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab

M. Habi Hendarso<sup>1</sup>, Linda Firdawaty<sup>2</sup>, Ariel Alvi Zahry<sup>3</sup>, Damai Batrisyia binti Muhammad Jebat<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>4</sup> University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia

 [habihendarso@gmail.com](mailto:habihendarso@gmail.com)

### Abstract

This study addresses the high divorce rates as indicators of marital conflict in Indonesia, Malaysia, and the United Arab Emirates (UAE). Premarital counseling programs in these three countries were analyzed to evaluate their effectiveness in enhancing marital stability and reducing household conflicts. A comparative literature review approach was employed, utilizing data from prior studies on the implementation and outcomes of premarital counseling programs. The findings reveal that Malaysia employs the most effective approach, integrating psychological aspects, conflict simulations, and faith-based education. This approach significantly reduced divorce rates, particularly in multi-ethnic communities. Indonesia emphasizes religious values through programs such as Bimbingan Perkawinan and Pusaka Sakinah, which are effective in foundational preparation but less so in addressing specific conflicts. In the UAE, a focus on local cultural values and gender roles has been effective for Emirati couples but less relevant for expatriate communities. In conclusion, premarital counseling programs hold substantial potential to enhance marital stability if tailored to the cultural and social contexts of each country. This study highlights the importance of adaptive approaches to improve the effectiveness of such programs across diverse societies.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

Des 19, 2024

Revised

Mei 10, 2025

Accepted

Mei 23, 2025

**Keywords:** Premarital Counseling, Marital Conflict, Marriage, Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates

Published by  
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



### PENDAHULUAN

Konseling pra-nikah telah menjadi instrumen penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Kebijakan ini bertujuan untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan peran serta tanggung jawab dalam pernikahan. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih diperdebatkan karena perbedaan dalam implementasi, pendekatan, dan penerimaan masyarakat di masing-masing negara. (Hadaiyatullah et al. 2024)

Di Indonesia, konseling pra-nikah diwajibkan bagi pasangan Muslim sebagai syarat sebelum menikah. (Iskandar 2017) Namun, berbagai tantangan seperti

keterbatasan tenaga konselor yang kompeten dan kurangnya waktu pelaksanaan seringkali mengurangi dampak program ini. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sundani, mengungkapkan bahwa metode ceramah yang dominan belum sepenuhnya efektif dalam mempersiapkan pasangan secara mental. Sebaliknya, Malaysia, melalui program yang dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Penelitian oleh Magfiroh menunjukkan bahwa kursus ini berhasil meningkatkan pemahaman pasangan akan dinamika pernikahan, namun belum menyentuh aspek digitalisasi. Uni Emirat Arab telah lebih maju dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam konseling mereka, tetapi data terkait dampaknya terhadap angka perceraian atau konflik rumah tangga masih minim.

Tingkat perceraian menunjukkan dinamika sosial yang unik di setiap negara. Di Uni Emirat Arab (UEA), kasus perceraian didominasi oleh pasangan warga Emirati. Perceraian antara pria Emirati dan wanita Emirati menyumbang sekitar 10,3% dari total kasus di pengadilan tertentu. Namun, pasangan pria Emirati dengan wanita non-Emirati mencatat angka lebih tinggi, sekitar 19%. Sementara itu, pasangan non-Emirati mendominasi perceraian dengan angka 66,9%, menunjukkan dinamika kompleks di kalangan ekspatriat.(Ziadah 2024)

Di Malaysia, tingkat perceraian pada 2023 menunjukkan penurunan signifikan. Jumlah perceraian turun sebesar 8,7%, dari 63.338 kasus pada 2022 menjadi 57.835. Penurunan ini terlihat pada Crude Divorce Rate (CDR), yang turun dari 1,9 menjadi 1,8 per seribu penduduk. Populasi Muslim menyumbang 76,6% dari total perceraian, tetapi angka ini juga menurun. Sebaliknya, perceraian di kalangan non-Muslim menurun lebih tajam, sebesar 21,4%. Data ini mengindikasikan adanya perbaikan stabilitas rumah tangga dan efektivitas mediasi.(MALAYSIA 2014)

Indonesia mencatat tren serupa. Perceraian di kalangan Muslim, yang mendominasi populasi, juga mengalami penurunan. Namun, usia median perceraian tetap stabil di angka 38 tahun untuk pria dan 35 tahun untuk wanita. Data ini menunjukkan pergeseran pola sosial yang signifikan. Penurunan jumlah pernikahan dan perceraian di semua kategori mengindikasikan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat.(Sa'adah et al. 2024) Total kasus perceraian di Indonesia berdasarkan data ini mencapai 408.347 kasus. Mayoritas disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (251.828 kasus) serta faktor ekonomi (108.488 kasus). Faktor lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga (5.174 kasus) dan meninggalkan salah satu pihak (34.322 kasus), juga cukup signifikan. Data ini menggambarkan kompleksitas penyebab perceraian, dengan beberapa faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi stabilitas pernikahan.

Secara keseluruhan, pola perceraian di UEA, Malaysia, dan Indonesia mencerminkan dampak dari berbagai faktor budaya, agama, dan ekonomi. Penurunan angka perceraian di beberapa wilayah menunjukkan perbaikan stabilitas rumah tangga, meskipun dinamika pernikahan dan perceraian tetap dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi yang kompleks. Meski terdapat berbagai penelitian yang membahas efektivitas konseling pra-nikah, penelitian sebelumnya masih terfokus pada implementasi program di satu negara atau membandingkan dua negara tanpa mempertimbangkan aspek digitalisasi, budaya, dan peran masyarakat secara lebih luas. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut

dengan melakukan perbandingan menyeluruh antara program konseling pra-nikah di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, mencakup analisis tingkat perceraian, konflik rumah tangga, dan kepuasan pernikahan. Studi ini juga akan mengkaji bagaimana materi konseling, pendekatan edukatif, dan inovasi teknologi dapat meningkatkan relevansi program dalam menghadapi tantangan pernikahan modern.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengeksplorasi potensi digitalisasi dan penerimaan masyarakat sebagai variabel kunci dalam meningkatkan efektivitas konseling pra-nikah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan konseling pra-nikah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman dan lintas budaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk membandingkan efektivitas konseling pernikahan di Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia. Fokus utamanya adalah memahami peran budaya, agama, dan kebijakan dalam memengaruhi keberhasilan layanan konseling dalam menurunkan tingkat perceraian. Data yang digunakan berasal dari literatur akademik, dokumen pemerintah, dan statistik resmi terkait perceraian dan praktik konseling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen hukum. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan utama dalam pendekatan konseling di masing-masing negara. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana elemen sosial seperti stigma terhadap perceraian, kebijakan pemerintah, dan peran agama berkontribusi pada keberhasilan konseling.

Temuan diharapkan mencakup pendekatan konseling dominan, seperti berbasis agama di UEA, pendekatan budaya di Malaysia, atau kombinasi keduanya di Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana konseling berhasil mencegah perceraian, serta faktor eksternal yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Meskipun menggunakan data sekunder, penelitian ini tetap mempertimbangkan aspek etika dengan memastikan keakuratan dan integritas sumber informasi. Hasilnya diharapkan memberikan wawasan teoretis yang relevan untuk meningkatkan layanan konseling pernikahan di tiga negara ini, dengan memperhatikan perbedaan sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika hubungan keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Program bimbingan perkawinan pra-nikah telah menjadi salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan perceraian yang meningkat di masyarakat. Dalam berbagai penelitian, efektivitas program ini dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan pernikahan dan stabilitas rumah tangga.

## 1. Efektifitas Program Konseling Pra-Nikah Di Indonesia

Program konseling pra-nikah di Indonesia mencerminkan keragaman pendekatan yang digunakan untuk mempersiapkan calon pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu program utama adalah Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar pernikahan, tanggung jawab suami-istri, manajemen konflik, serta nilai-nilai agama. Modul-modul yang digunakan bertujuan menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. (Putri, Jarnawi, and Muttaqin 2024)

Selain itu, Program Pusaka Sakinah memberikan pendekatan yang lebih holistik dengan tiga komponen utama: “Berkah” (edukasi pernikahan), “Kompak” (konseling dan mediasi), serta “Lestari” (dukungan ketahanan keluarga). Pendekatan ini bertujuan tidak hanya mempersiapkan pasangan secara teori, tetapi juga mendukung keberlangsungan hubungan mereka di tengah tantangan rumah tangga. (Wardani, Sharoni, and Triyanto 2024)

BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) menekankan komunikasi pasangan dan harmoni rumah tangga, sementara lembaga pendidikan Islam berkontribusi melalui integrasi materi pernikahan dalam kurikulum pesantren. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas seperti Community-Based Participatory Research (CBPR) memberikan ruang diskusi terbuka bagi calon pengantin, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik budaya lokal yang kuat. (Arif et al. 2024)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program-program ini meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait peran dan tanggung jawab rumah tangga. Pendekatan berbasis agama yang dikombinasikan dengan metode interaktif seperti simulasi dan mediasi konflik dianggap potensial dalam menurunkan angka perceraian serta meningkatkan kualitas hubungan keluarga. (Novalia, Khairuddin, and Zuhriani 2021)

Namun demikian, analisis terhadap efektivitas program ini masih belum menyentuh dampak jangka panjang secara nasional. Sebagian besar data yang tersedia hanya mencakup efek jangka pendek atau studi lokal. Contohnya, studi oleh Nopilia dan Kurnianto (2022) menyoroti keberhasilan program di KUA Kecamatan Konda, dan studi oleh Yuniarti et al. (2024) mencatat penurunan angka perceraian sebesar 16,7% di wilayah Summersari. Meskipun menunjukkan hasil positif, kedua studi tersebut terbatas secara geografis dan belum mewakili kondisi nasional.

Penelitian oleh Lubis dan Muktarruddin (2023) mengangkat isu krusial lainnya: meski telah ada regulasi seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, implementasi program di lapangan masih belum seragam, dan keterbatasan waktu pelaksanaan serta kualitas materi menjadi kendala utama. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsep program cukup kuat, pelaksanaannya belum optimal dalam membangun ketahanan rumah tangga secara luas.

Untuk memperkuat klaim efektivitas program secara nasional, diperlukan evaluasi dampak jangka panjang terhadap stabilitas rumah tangga, khususnya dalam rentang waktu 5–10 tahun setelah pernikahan. Selain itu, data longitudinal atau studi komparatif antara pasangan yang mengikuti konseling dan yang tidak

sangat dibutuhkan untuk memberikan dasar empiris yang lebih solid. Tanpa adanya bukti seperti ini, keberhasilan program masih bersifat asertif dan berisiko bias terhadap konteks lokal.

Beberapa rekomendasi penting dalam meningkatkan efektivitas program ini mencakup:

1. Peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya bimbingan pra-nikah kepada masyarakat luas.
2. Penyesuaian materi program berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan agama calon pengantin.
3. Peningkatan kapasitas konselor, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pendekatan interpersonal.

Efektivitas jangka panjang juga sangat bergantung pada dukungan lintas sektor: pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat. Koordinasi yang baik di antara pihak-pihak ini akan menjamin kesinambungan program dan menjadikannya sebagai sarana preventif sekaligus transformasional dalam membentuk keluarga yang kuat dan harmonis.

Dengan pendekatan yang lebih kritis, berbasis data jangka panjang, dan implementasi yang adaptif terhadap konteks sosial-budaya Indonesia, program konseling pra-nikah berpotensi menjadi pondasi utama dalam menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia.

## **2. Efektifitas Program Konseling Pra-Nikah Di Malaysia**

Di Malaysia, program konseling pra-nikah dikenal sebagai "Kursus Pra-Perkahwinan Islam", yang diwajibkan bagi pasangan Muslim sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Jabatan Agama Islam Negeri. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan membangun rumah tangga yang harmonis sesuai prinsip-prinsip Islam. (Kamarusdiana et al. 2022)

Kursus ini mencakup berbagai modul yang membahas tanggung jawab suami istri, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, aspek hukum pernikahan dalam Islam, serta keterampilan komunikasi dan pengelolaan keuangan keluarga. Dengan demikian, pasangan diharapkan dapat membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupan pernikahan mereka. (Kamarusdiana et al. 2022)

Pendaftaran kursus ini difasilitasi melalui Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM), yang memungkinkan calon pengantin untuk memilih jadwal dan lokasi kursus secara daring. Namun, cakupan digital ini awalnya terbatas pada beberapa negeri seperti Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, dan Johor, dengan rencana ekspansi ke seluruh negeri di masa depan. (Ramadhani and Andaryuni 2024)

Selain JAKIM, beberapa institusi pendidikan tinggi seperti Universiti Putra Malaysia (UPM) juga menyelenggarakan kursus pra-perkahwinan bekerja sama dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), menggunakan Modul Bersepadu Kursus Pra-Perkahwinan Islam. Tujuannya tetap sama: membekali pasangan dengan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi tantangan rumah tangga.

Program ini telah banyak dipuji sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat institusi keluarga. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kursus

ini berdampak positif terhadap stabilitas pernikahan dan pengurangan konflik rumah tangga. (Othman et al. 2023) Namun, klaim mengenai “dampak signifikan” ini masih perlu ditinjau lebih kritis, karena sebagian besar penelitian bersifat deskriptif atau administratif, dan belum menyertakan evaluasi berbasis data longitudinal atau studi kuantitatif jangka panjang.

Misalnya, belum ada data statistik yang konsisten yang menunjukkan adanya penurunan angka perceraian secara nasional yang dapat dikaitkan langsung dengan kewajiban mengikuti kursus pra-perkahwinan. Demikian pula, belum tersedia cukup banyak studi yang mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh kursus terhadap kepuasan pernikahan, kualitas komunikasi pasangan, atau ketahanan rumah tangga dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun setelah menikah. Tanpa rujukan empiris seperti ini, efektivitas program hanya dapat disimpulkan secara terbatas.

Tantangan lainnya adalah tingkat keterlibatan peserta yang masih bervariasi. Beberapa calon pengantin mengikuti kursus hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa menyerap substansi materi. Selain itu, kualitas penyampaian materi dan kompetensi konselor juga tidak selalu seragam di semua lokasi, yang dapat memengaruhi efektivitas jangka panjang dari program ini. (Tam et al. 2011)

Untuk meningkatkan efektivitas program, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, penyesuaian konten kursus untuk lebih relevan dengan latar belakang sosial dan budaya peserta, termasuk non-Muslim. Kedua, pelatihan lanjutan untuk para fasilitator atau konselor perlu ditingkatkan agar mereka mampu menangani dinamika pasangan secara lebih profesional. Ketiga, diperlukan evaluasi berkala dan sistematis terhadap isi dan metode kursus agar tetap kontekstual dengan perkembangan sosial dan kebutuhan pasangan masa kini.

Dengan dukungan pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat, kursus pra-perkahwinan di Malaysia memiliki potensi besar untuk menjadi alat preventif dalam membentuk keluarga yang tangguh. Namun, untuk memperkuat validitas dan legitimasi program, diperlukan pendekatan evaluatif berbasis bukti yang menilai efektivitas program secara kuantitatif dalam jangka panjang. Dengan demikian, Malaysia tidak hanya akan menjadi contoh praktik baik dari segi kebijakan, tetapi juga dalam hal keberhasilan empiris menciptakan rumah tangga yang harmonis.

### **3. Efektifitas Program Konseling Pra-Nikah Di Malaysia Uni Emirat Arab (UEA)**

Uni Emirat Arab (UEA), program konseling pra-nikah menjadi salah satu upaya penting dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan meminimalkan konflik rumah tangga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pemahaman pasangan terhadap pernikahan dan menekan angka perceraian. (Al-Darmaki 2005)

Program konseling pra-nikah di Uni Emirat Arab (UEA) mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung stabilitas pernikahan. Pendekatan ini mencakup pemeriksaan medis wajib, pendidikan terkait kesehatan dan pernikahan, serta dukungan sosial dan finansial untuk pasangan Emirati. Dengan menggabungkan aspek-aspek medis, hukum, dan sosial,

program ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang sehat dan mencegah konflik rumah tangga di masa depan.(Al-Darmaki 2012)

Salah satu elemen penting dalam program pra-nikah di UEA adalah kewajiban pemeriksaan medis untuk pasangan Muslim yang akan menikah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit genetik dan infeksi menular, seperti Beta-thalassemia, anemia sel sabit, HIV, Hepatitis B & C, dan penyakit lainnya. Pemeriksaan ini juga mencakup tes rubella (campak Jerman) dan penggolongan darah, yang dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan tidak memiliki risiko medis yang signifikan yang dapat memengaruhi kesehatan mereka atau anak-anak mereka di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mencegah pernikahan berisiko tinggi dan membantu pasangan membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Sebuah studi di Dubai mencatat bahwa dari 6.420 individu yang menjalani pemeriksaan pra-nikah, 8,5 persen didiagnosis sebagai pembawa sifat genetik, dengan prevalensi Beta-thalassemia sebesar 4,56 persen dan anemia sel sabit sebesar 2,9 persen.(Brinson and Al-amri 2005)

Konseling pra-nikah di UEA juga memberikan perhatian besar pada dimensi budaya dan agama. Dalam masyarakat Emirati, nilai-nilai agama dan tradisional memainkan peran penting dalam menentukan hubungan rumah tangga. Program ini menekankan pentingnya konseling berbasis agama, yang dirancang untuk membantu pasangan memahami tanggung jawab mereka sebagai suami-istri sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, konseling ini juga memberikan panduan tentang bagaimana membangun hubungan yang harmonis dalam konteks nilai-nilai tradisional dan keluarga besar, yang sering kali memiliki peran besar dalam kehidupan individu di UEA. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya ini sangat efektif untuk pasangan Emirati, tetapi kurang relevan untuk komunitas ekspatriat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.(Heath, Vogel, and Al-Darmaki 2016)

Dukungan finansial juga menjadi komponen penting dalam kebijakan pernikahan di UEA. Pemerintah menawarkan hibah pernikahan sebesar AED 70.000 kepada pasangan Emirati berpenghasilan rendah untuk mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga mereka. Selain itu, terdapat inisiatif seperti Dana Pernikahan yang bertujuan untuk mendorong pasangan Emirati menikah dengan sesama Emirati, yang dianggap penting untuk melestarikan nilai-nilai sosial dan demografis Emirati. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah UEA tidak hanya fokus pada aspek kesehatan dan budaya, tetapi juga pada kestabilan ekonomi sebagai faktor penting dalam menjaga hubungan rumah tangga.(Al-Darmaki 2012)

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi program konseling pra-nikah di UEA, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan komunitas ekspatriat. Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di kalangan pasangan non-Emirati jauh lebih tinggi dibandingkan pasangan Emirati. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan program ini mungkin kurang relevan atau kurang mencakup kebutuhan unik komunitas yang memiliki latar budaya berbeda. Dalam beberapa kasus, pasangan ekspatriat mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan konseling atau tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai yang menjadi dasar program ini. Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas

program, perlu ada upaya untuk mengembangkan modul konseling yang lebih inklusif, yang dapat disesuaikan dengan keragaman budaya di UEA.

Selain tantangan yang dihadapi oleh komunitas ekspatriat, program konseling pra-nikah di UEA juga menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan layanan kesehatan mental yang lebih terstruktur. Penelitian mencatat bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya layanan kesehatan mental, ketersediaan sumber daya yang kompeten masih terbatas. Dalam konteks konseling pra-nikah, hal ini berarti bahwa pasangan mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk menangani isu-isu psikologis yang dapat memengaruhi hubungan mereka, seperti kecemasan, stres, atau konflik interpersonal. Oleh karena itu, model konseling yang lebih komprehensif, yang menggabungkan dimensi kesehatan mental, agama, dan budaya, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas program ini.(Al-Darmaki 2012)

Penelitian juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konseling pra-nikah. Studi yang melibatkan mahasiswa universitas di UEA menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki sikap positif terhadap pemeriksaan pra-nikah, tetapi ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya program ini. Misalnya, banyak peserta setuju bahwa pemeriksaan pra-nikah dapat mencegah penularan penyakit dan memastikan kesehatan pasangan, tetapi hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman mendalam tentang komponen spesifik program ini. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan kesadaran publik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program konseling pra-nikah.

Kesimpulannya, program konseling pra-nikah di UEA menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendukung pasangan Emirati, dengan penekanan pada pemeriksaan medis, nilai-nilai budaya, dan dukungan finansial. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan komunitas ekspatriat dan meningkatkan layanan kesehatan mental. Dengan langkah-langkah seperti pengembangan modul konseling yang lebih inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan integrasi dimensi kesehatan mental, program ini dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung stabilitas pernikahan di UEA secara keseluruhan. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan program ini. Beberapa pasangan masih enggan untuk berpartisipasi dalam program konseling karena stigma atau kurangnya kesadaran tentang manfaatnya. Selain itu, variasi dalam kualitas konselor dan metode pelaksanaan juga dapat memengaruhi keberhasilan program ini. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan konselor dan penyesuaian materi konseling agar relevan dengan kebutuhan pasangan modern menjadi langkah penting yang perlu diambil.

Secara keseluruhan, program konseling pra-nikah di UEA menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi konflik rumah tangga dan menekan angka perceraian. Dengan memperkuat fondasi pernikahan melalui konseling yang berbasis budaya dan agama, negara ini berhasil mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan dalam hubungan mereka. Keberhasilan program ini juga memberikan pelajaran berharga bagi negara lain yang ingin mengimplementasikan inisiatif serupa untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

## PEMBAHASAN

Ketiga negara—Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA)—memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasi program konseling pra-nikah. Perbedaan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan prioritas masing-masing negara, baik dalam metode pelaksanaan maupun hasil yang dicapai.

Perbandingan Program Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA)

Aspek	Indonesia	Malaysia	UEA
<b>Sifat Program</b>	Opsional (sangat dianjurkan)	Wajib	Wajib
<b>Materi</b>	Berbasis agama, manajemen konflik, nilai keluarga	Agama, komunikasi, HIV/AIDS, manajemen konflik	Genetik, agama, kesehatan reproduksi, nilai keluarga
<b>Pelaksana</b>	Kantor Urusan Agama (KUA), komunitas	JAKIM, badan agama negara bagian	Pemerintah, Pusat Kesehatan Primer
<b>Durasi dan Format</b>	Singkat, bergantung pada lokasi	Terstruktur, beberapa hari	Pemeriksaan dan konseling individu
<b>Fokus Utama</b>	Nilai agama dan harmoni keluarga	Kesehatan, komunikasi, dan kesiapan mental	Kesehatan genetik dan kompatibilitas
<b>Keterlibatan Budaya</b>	Minimal (umum berbasis agama Islam)	Sesuai kebutuhan komunitas multikultural	Sangat tinggi, mencakup peran keluarga

Indonesia memiliki beberapa program pra-nikah yang dikelola oleh Kementerian Agama, termasuk Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pusaka Sakinah. Program ini berfokus pada pembekalan calon pengantin dengan pemahaman tentang konsep dasar pernikahan, tanggung jawab suami-istri, komunikasi yang sehat, dan nilai-nilai agama. Program ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan modul yang mencakup materi edukasi berbasis agama dan manajemen konflik. Namun, di beberapa daerah, pelaksanaan program ini cenderung sederhana, seringkali hanya mencakup pengetahuan dasar agama seperti wudu, shalat, dan rukun iman. Ada juga variasi pendekatan berbasis komunitas yang menekankan diskusi partisipatif. Secara umum, program ini bersifat opsional dan tidak wajib, meskipun sangat dianjurkan. (Nopilia and Kurnianto 2022)

Malaysia memiliki Kursus Pra-Perkahwinan Islam yang diwajibkan untuk calon pengantin Muslim. Program ini dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan beragam badan agama di tingkat negara bagian. Materi kursus mencakup modul MBKPI (Modul Bersepadu Kursus Pra-Perkahwinan Islam), yang berisi video edukatif, ilustrasi, dan latihan interaktif tentang kehidupan pernikahan, termasuk komunikasi dan manajemen konflik. (Kamarusdiana et al. 2022)

Program ini diwajibkan di seluruh negara bagian dan disertai persyaratan tambahan seperti tes HIV. Sertifikat kelulusan kursus menjadi salah satu syarat administratif untuk pendaftaran pernikahan. Pendekatan ini lebih terstruktur dan seragam dibandingkan Indonesia, dengan durasi kursus yang umumnya berlangsung beberapa hari. Di UEA, program pra-nikah sering kali dikaitkan dengan Premarital Screening and Genetic Counseling (PMSGC), yang diwajibkan bagi calon pengantin. Program ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit genetik dan menilai kompatibilitas genetik pasangan. Selain itu, ada elemen konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, agama, dan peran keluarga dalam pernikahan. Pendekatan di UEA cenderung fokus pada pencegahan risiko kesehatan dan memberikan pendidikan berbasis agama serta budaya, dengan perhatian besar pada nilai-nilai tradisional. Di beberapa wilayah, seperti Dubai dan Ras Al Khaimah, hasil pemeriksaan genetik digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap risiko pernikahan, meskipun pasangan tetap memiliki kebebasan untuk melanjutkan pernikahan meski hasilnya tidak kompatibel.

Di Indonesia, program konseling pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama berfokus pada aspek edukasi, khususnya dalam membangun pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan dan agama. Metode yang digunakan lebih bersifat instruktif dan berbasis modul, di mana calon pasangan dibimbing melalui pelatihan kelompok dan diskusi di bawah pengawasan konselor dari Kantor Urusan Agama (KUA). Di Indonesia, pendidikan pra-nikah diatur melalui Surat Keputusan Dirjen Urusan Agama Islam. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga yang diakui oleh Kementerian Agama. Program ini berbasis pada nilai-nilai agama Islam dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai tanggung jawab suami-istri, komunikasi dalam rumah tangga, serta manajemen konflik. Namun, pendidikan pra-nikah di Indonesia bersifat anjuran. Meskipun sertifikat pendidikan pra-nikah dapat menjadi syarat administratif dalam beberapa wilayah, secara nasional program ini tidak diwajibkan.

Sebaliknya, Malaysia memiliki pendekatan yang lebih tegas dengan menjadikan pendidikan pra-nikah sebagai syarat wajib untuk menikah. Setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus pra-nikah, seperti yang diatur dalam berbagai ketentuan di tingkat negara bagian. Misalnya, Enakmen 11 Tahun 2003 (Negeri Sembilan) mengharuskan calon pengantin menyertakan sertifikat pra-nikah sebagai bagian dari dokumen untuk mendapatkan izin menikah. Pelaksanaan program ini diorganisasi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan menggunakan modul standar yang mencakup topik-topik seperti manajemen keluarga, kesehatan, dan resolusi konflik.

Perbedaan signifikan lainnya adalah sifat program ini. Di Indonesia, pendidikan pra-nikah cenderung berorientasi pada penyampaian materi secara teoritis melalui modul atau ceramah di KUA. Pendekatan ini kurang interaktif dan sering kali dilaksanakan dalam waktu singkat. Sementara itu, di Malaysia, kursus pra-nikah lebih terstruktur, dengan penggunaan multimedia, simulasi konflik, dan sesi diskusi untuk meningkatkan keterlibatan peserta. Kajian ini juga menunjukkan bahwa meskipun tujuan akhirnya serupa, efektivitas pendidikan pra-nikah di kedua negara sangat dipengaruhi oleh peraturan yang mendasarinya.

Di Malaysia, karena sifatnya wajib, program ini mampu menjangkau hampir seluruh pasangan Muslim yang akan menikah. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana cakupan peserta masih terbatas pada mereka yang secara sukarela mengikuti program. Akibatnya, dampak program pra-nikah terhadap angka perceraian di Indonesia cenderung lebih sulit diukur secara konsisten.(Ahmed Hassan and Elkhateeb 2024)

Sementara itu, di Malaysia, konseling pra-nikah memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dengan elemen psikologis yang lebih menonjol. Program ini diwajibkan bagi calon pengantin dan dikelola secara resmi oleh pemerintah. Penelitian seperti "The Effectiveness of Premarital Counseling Programs in Malaysia" menyoroti keberhasilan program ini dalam mempersiapkan pasangan secara mental dan emosional. Konseling berbasis psikologi ini lebih interaktif, sering kali melibatkan simulasi konflik dan penyelesaian masalah untuk meningkatkan komunikasi antara pasangan. Selain itu, pendekatan berbasis Islam, seperti yang disebutkan dalam penelitian "Impact of Islamic Premarital Counseling on Marital Stability in Malaysia", menjadi fondasi utama. Fokusnya pada nilai-nilai Islami terbukti efektif dalam menjaga stabilitas rumah tangga, meskipun metode ini kurang fleksibel bagi pasangan non-Muslim.(Heath, Vogel, and Al-Darmaki 2016)

Di UEA, metode konseling menggabungkan pendekatan budaya dan agama dengan teknik modern dalam pengelolaan konflik. Program konseling sering kali melibatkan pakar hubungan, ulama, dan psikolog. Studi seperti "Cultural Influences on Premarital Counseling Effectiveness in the UAE" menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dalam konseling. Program ini tidak hanya menekankan persiapan psikologis dan emosional, tetapi juga mengajarkan pasangan untuk memahami peran gender, tanggung jawab dalam keluarga, dan keterampilan komunikasi yang adaptif dalam konteks budaya Arab. Selain itu, penelitian "Effectiveness of Premarital Counseling Programs in the UAE" menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dan agama berhasil menurunkan tingkat perceraian dengan memberikan pasangan pemahaman yang lebih baik tentang ekspektasi pernikahan.

Program Konseling di Indonesia, Malaysia dan UEA

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>	<b>UEA</b>
<b>Efektivitas Umum</b>	Moderat	Tinggi	Tinggi dalam aspek kesehatan genetik
<b>Penurunan Perceraian</b>	Terbatas	Ada tetapi belum signifikan	Tidak menjadi fokus utama
<b>Peningkatan Pemahaman</b>	Baik dalam beberapa wilayah	Sangat baik	Sangat baik terkait genetik dan kesehatan
<b>Tantangan</b>	Implementasi tidak seragam	Perbedaan kualitas antar wilayah	Pasangan berisiko tinggi tetap menikah

Dalam menganalisis metode program konseling pra-nikah di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA), terlihat perbedaan mencolok dalam pendekatan yang digunakan. Ketiga negara ini memiliki cara yang unik dalam mengelola program konseling yang mencerminkan kebutuhan masyarakatnya, baik dari aspek pendidikan, budaya, maupun psikologi.

### **1. Pendekatan Pendidikan vs. Psikologi**

Indonesia menonjol dengan pendekatan pendidikan berbasis agama. Program konseling pra-nikah di Indonesia umumnya dilaksanakan melalui bimbingan modul di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus utamanya adalah internalisasi nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, seperti kesalingan, tanggung jawab, serta membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah. (Firmansyah 2024)

Namun, pendekatan ini cenderung bersifat instruktif dan satu arah, di mana peserta lebih banyak menerima ceramah daripada terlibat dalam diskusi aktif atau latihan praktis. Keterbatasan ini menjadi tantangan ketika dihadapkan pada isu-isu pernikahan yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian emosional, atau masalah komunikasi yang tidak kasat mata. Studi longitudinal mengenai efektivitas pendekatan ini dalam jangka panjang masih terbatas, dan belum tersedia cukup data yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang diajarkan mampu menangkal konflik laten atau membangun daya tahan emosional pasangan setelah menikah.

Sebaliknya, Malaysia mengintegrasikan pendekatan psikologis dan praktis ke dalam kursus pra-perkahwinan. Materi tidak hanya mencakup ajaran agama, tetapi juga menekankan latihan komunikasi, simulasi konflik, dan penyelesaian masalah secara interaktif. Pendekatan ini memberi ruang kepada pasangan untuk memahami dinamika emosional dan strategi menghadapi konflik rumah tangga secara konkret. Dalam konteks sosial Malaysia yang relatif multikultural, pendekatan ini dianggap lebih adaptif dan relevan. (Othman et al. 2023)

Namun demikian, efektivitas pendekatan ini masih belum didukung secara memadai oleh bukti empiris jangka panjang. Klaim tentang peningkatan kualitas pernikahan atau penurunan angka perceraian akibat kursus ini umumnya bersifat administratif dan deskriptif. Studi longitudinal atau data statistik yang mengukur perubahan perilaku pasangan 5–10 tahun setelah mengikuti kursus masih sangat terbatas. Selain itu, kualitas pelaksanaan yang bervariasi antar wilayah dan kurangnya evaluasi sistematis terhadap hasil nyata dari kursus ini menjadi hambatan utama dalam menilai keberhasilannya secara nasional.

Sementara itu, di Uni Emirat Arab (UEA), pendekatan psikologis dikombinasikan dengan pemahaman budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Konseling pra-nikah di UEA menggarisbawahi peran gender, struktur keluarga, dan penyelesaian konflik dalam konteks tradisi Arab. Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif, karena tidak hanya menyampaikan materi edukatif, tetapi juga mendalam dalam membahas harapan peran suami-istri secara realistis dalam budaya yang patriarkal. (Al-Darmaki 2012)

Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan: keterbatasan dalam mengakomodasi perubahan sosial, terutama terkait peran perempuan yang

semakin aktif di ruang publik. Meskipun pendekatan psikologis kuat, belum banyak studi publikasi independen yang mengevaluasi hasil nyata dari program ini terhadap keberhasilan rumah tangga dalam jangka panjang. Apakah peserta merasa lebih siap secara emosional? Apakah mereka mampu mengelola konflik secara sehat setelah menikah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih terbuka dan memerlukan data kuantitatif yang lebih konsisten.

Secara umum, meskipun perbandingan ketiga negara ini menampilkan variasi pendekatan yang menarik, masing-masing belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan jangka panjang yang terukur secara empiris. Pendekatan Indonesia kuat dari sisi spiritualitas, tetapi perlu penguatan aspek praktis dan psikologis. Malaysia lebih progresif secara metode, namun masih kurang evaluasi terhadap efektivitas program dalam realitas rumah tangga yang kompleks. UEA tampak paling terstruktur secara budaya, tetapi tetap perlu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Agar perbandingan menjadi lebih aplikatif dan relevan, diperlukan studi kasus atau data longitudinal dari pasangan yang telah mengikuti program di masing-masing negara, dengan analisis terhadap:

- Tingkat keberlangsungan pernikahan dalam 5–10 tahun.
- Tingkat kepuasan pernikahan.
- Kemampuan penyelesaian konflik dan komunikasi pasangan pasca-program.

Tanpa evaluasi ini, perbandingan antar negara hanya akan bersifat deskriptif, bukan analitis. Mengintegrasikan pendekatan berbasis agama dan psikologi, dengan penyesuaian kontekstual lokal, menjadi arah strategis yang potensial dalam menyusun model konseling pra-nikah yang efektif dan berkelanjutan.

## **2. Peran Budaya**

Budaya memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program konseling di setiap negara. Di Uni Emirat Arab (UEA), konseling pra-nikah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Budaya Arab yang patriarkal, dengan penekanan pada struktur keluarga tradisional, menjadi fondasi dalam merancang program. Pasangan diajarkan untuk menghormati nilai-nilai kekeluargaan dan norma gender tradisional, sambil juga dibekali dengan keterampilan menghadapi dinamika rumah tangga dalam konteks sosial modern. Pendekatan ini memungkinkan program konseling tetap relevan di tengah perubahan tanpa kehilangan akar budayanya. (Al-Darmaki 2012)

Di Malaysia, peran budaya juga signifikan, terutama karena masyarakatnya yang multietnis, termasuk Melayu, Cina, India, dan kelompok lainnya. Program konseling pra-nikah di negara ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Islami yang inklusif, sembari memberikan ruang adaptasi terhadap keragaman budaya. Misalnya, kursus pra-perkahwinan disampaikan dalam berbagai bahasa dan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan latar belakang peserta. Fleksibilitas ini menciptakan penerimaan yang luas, karena kursus tidak dipaksakan dalam satu format tunggal, melainkan memperhatikan dinamika sosial budaya yang ada.

Sementara itu, di Indonesia, peran budaya dalam konseling pra-nikah belum terintegrasi secara sistematis dalam program nasional. Meskipun pendekatan berbasis agama sangat ditekankan, khususnya dalam modul-modul yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), adaptasi terhadap budaya lokal cenderung minim dalam pelaksanaan standar. Pernyataan bahwa "peran budaya tidak terlihat" tentu perlu diluruskan — Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya, seperti budaya Minangkabau yang matrilineal, Jawa yang menjunjung tinggi hierarki sosial, atau Bugis yang mengenal konsep siri' (harga diri) dalam relasi keluarga. Ketika program konseling disampaikan dengan pendekatan yang seragam, ketidaksesuaian bisa terjadi, terutama jika nilai-nilai budaya lokal yang kuat tidak diakomodasi.

Sebagai contoh, penelitian di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara materi konseling pra-nikah nasional dan norma adat Bugis-Makassar membuat sebagian pasangan kesulitan menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan. Sebaliknya, di daerah Minangkabau, beberapa KUA telah mulai melibatkan tokoh adat dalam sesi konseling, guna menjembatani antara ajaran agama dan praktik sosial budaya yang hidup di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah telah berupaya mengintegrasikan kearifan lokal, namun belum menjadi kebijakan atau pendekatan nasional yang terstruktur.

Dengan demikian, dibanding menyimpulkan bahwa budaya "tidak terlihat" dalam konseling pra-nikah di Indonesia, lebih tepat dikatakan bahwa pendekatan budaya masih belum menjadi komponen utama dalam desain program nasional. Padahal, jika kearifan lokal diintegrasikan secara bijak dan kontekstual, efektivitas program dapat meningkat karena lebih sesuai dengan kebutuhan riil pasangan di tiap daerah.

### **3. Interaktivitas**

Interaktivitas dalam program konseling sangat menentukan efektivitasnya. Malaysia memiliki keunggulan dalam hal ini, dengan program yang dirancang untuk lebih interaktif melalui simulasi konflik dan latihan komunikasi. Metode ini memungkinkan pasangan untuk mengalami dinamika hubungan secara langsung dan belajar bagaimana menangani tantangan yang mungkin muncul. Pendekatan ini juga membantu pasangan untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif, yang menjadi dasar dari hubungan yang harmonis. (Kamarusdiana et al. 2022)

Di UEA, interaktivitas juga menjadi perhatian, tetapi dengan pendekatan interpersonal yang lebih mendalam. Program ini sering kali melibatkan sesi diskusi satu-satu dengan konselor, yang memungkinkan pasangan untuk berbagi kekhawatiran pribadi dan mendapatkan panduan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memberikan pengalaman yang lebih personal, yang sering kali lebih efektif dalam membangun hubungan yang kuat.

Indonesia, di sisi lain, memiliki program yang lebih instruktif dan berbasis modul. Sesi konseling biasanya dilakukan dalam format kelompok, dengan fokus pada penyampaian informasi daripada interaksi langsung antara pasangan. Meskipun metode ini efisien untuk menjangkau banyak pasangan, kurangnya interaktivitas dapat menjadi hambatan dalam membantu pasangan memahami dinamika hubungan secara praktis.

#### 4. Fokus pada Konflik Rumah Tangga

Fokus utama program konseling di Malaysia dan UEA adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik rumah tangga. Program di kedua negara ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang membantu pasangan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Malaysia, misalnya, menggunakan latihan penyelesaian masalah untuk meningkatkan kemampuan pasangan dalam menangani konflik. Di UEA, perhatian khusus diberikan pada penyelesaian konflik dalam kerangka peran gender, yang mencerminkan tradisi lokal. Indonesia, di sisi lain, lebih berfokus pada persiapan awal pernikahan. Program konseling di negara ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan, tetapi kurang menekankan pada strategi untuk menangani konflik rumah tangga. Hal ini dapat menjadi kelemahan, terutama dalam membantu pasangan menghadapi tantangan yang mungkin muncul setelah menikah.

Program konseling pra-nikah di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA) memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam menekan konflik rumah tangga. Di Indonesia, program seperti Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah dirancang untuk membangun fondasi pernikahan yang kuat dengan fokus pada nilai-nilai agama dan tanggung jawab pasangan. Meskipun program ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dasar, efektivitasnya dalam menangani konflik rumah tangga spesifik masih terbatas. Penyebab utama perceraian di Indonesia, seperti perselisihan yang terus-menerus, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pendidikan agama memerlukan elemen interaktif seperti simulasi konflik untuk lebih efektif dalam menyelesaikan masalah pasangan.

Malaysia memiliki pendekatan konseling pra-nikah yang lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek psikologis dan simulasi konflik. Program ini diwajibkan oleh pemerintah dan berhasil menurunkan angka perceraian sebesar 8,7 persen antara tahun 2022 dan 2023. Pendekatan yang disesuaikan dengan masyarakat multietnis membantu pasangan dari berbagai latar belakang budaya memahami pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam rumah tangga. Efektivitas program ini terlihat dalam penurunan tajam angka perceraian di kalangan non-Muslim, yang menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas rumah tangga.

Di UEA, program konseling pra-nikah menekankan nilai-nilai budaya lokal, pembagian peran gender, dan tanggung jawab pasangan, dengan tambahan skrining kesehatan dan genetik. Program ini efektif untuk pasangan Emirati, terbukti dari rendahnya angka perceraian di kalangan mereka sebesar 10,3 persen. Namun, angka perceraian yang tinggi di antara pasangan non-Emirati sebesar 66,9 persen menunjukkan bahwa program ini kurang relevan bagi komunitas ekspatriat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan penyesuaian program agar lebih inklusif.

Secara keseluruhan, efektivitas konseling pra-nikah sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan dan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Malaysia menunjukkan keberhasilan paling signifikan dengan penurunan angka perceraian yang konsisten, sementara UEA berhasil dalam konteks lokal tetapi menghadapi tantangan dalam menjangkau komunitas yang

lebih beragam. Indonesia menunjukkan potensi yang baik tetapi memerlukan peningkatan untuk menangani konflik rumah tangga secara lebih spesifik dan mendalam.

### **Efektivitas program konseling pra-nikah di Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia**

Efektivitas program konseling pra-nikah di Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia dapat dilihat dari perubahan tingkat perceraian dan stabilitas rumah tangga di masing-masing negara. Data yang tersedia memberikan wawasan tentang bagaimana program ini berkontribusi terhadap stabilitas pernikahan, meskipun hasilnya menunjukkan variasi karena perbedaan budaya, pendekatan konseling, dan faktor sosial.

<b>Negara</b>	<b>Tingkat Perceraian</b>	<b>Efektivitas Program</b>	<b>Tantangan</b>
<b>UEA</b>	Pasangan Emirati: 10,3%	Program konseling pra-nikah membantu pasangan Emirati memahami ekspektasi dan tanggung jawab mereka.	Angka perceraian tinggi di kalangan non-Emirati (66,9%) menunjukkan kurangnya relevansi program untuk ekspatriat.
	Pria Emirati & Wanita Non-Emirati: 19%	Fokus pada nilai budaya lokal dan pembagian peran gender memberikan hasil positif.	Perlu adaptasi program untuk komunitas multikultural.
	Pasangan Non-Emirati: 66,9%		
<b>Malaysia</b>	Penurunan tingkat perceraian sebesar 8,7% dari 2022 ke 2023	Program konseling wajib berhasil menurunkan Crude Divorce Rate (CDR) dari 1,9 menjadi 1,8 per seribu penduduk.	Perbedaan kualitas pelaksanaan antar wilayah.
	Populasi Muslim menyumbang 76,6% kasus perceraian	Penekanan pada psikologi dan simulasi konflik meningkatkan komunikasi pasangan.	Perlunya pendekatan yang lebih seragam di seluruh negara bagian.
	Penurunan perceraian non-Muslim sebesar		

	21,4%		
<b>Indonesia</b>	Total perceraian: 408.347 kasus	Program konseling pra-nikah efektif dalam membangun fondasi agama dan nilai-nilai pernikahan.	Tingginya angka perceraian akibat perselisihan terus-menerus (251.828 kasus) dan faktor ekonomi (108.488 kasus).
	Penyebab utama: Perselisihan (61,7%) dan ekonomi (26,6%)	Membantu penurunan angka perceraian di kalangan Muslim.	Kurangnya elemen interaktif seperti simulasi konflik untuk menangani masalah rumah tangga.
	Usia median perceraian: Pria (38 tahun), Wanita (35 tahun)		

Di UEA, perceraian antara pasangan Emirati menyumbang 10,3% dari total kasus. Angka ini relatif rendah dibandingkan pasangan pria Emirati dengan wanita non-Emirati (19%) atau pasangan non-Emirati (66,9%). Penekanan pada nilai-nilai budaya lokal dan pembagian peran gender dalam program konseling pra-nikah tampaknya efektif membantu pasangan Emirati memahami ekspektasi pernikahan dan tanggung jawab mereka. Namun, angka perceraian yang lebih tinggi di kalangan pasangan non-Emirati menunjukkan bahwa program ini mungkin kurang relevan atau tidak mencukupi bagi komunitas ekspatriat yang memiliki latar budaya dan dinamika yang berbeda. Secara keseluruhan, konseling pra-nikah di UEA cukup efektif untuk kelompok lokal tetapi memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mencakup keragaman budaya.

Malaysia mencatat penurunan tingkat perceraian sebesar 8,7% dari tahun 2022 ke 2023, dengan Crude Divorce Rate (CDR) turun dari 1,9 menjadi 1,8 per seribu penduduk. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan program konseling pra-nikah yang diwajibkan oleh pemerintah, terutama dalam populasi Muslim yang menyumbang 76,6% dari total kasus perceraian. Penekanan pada pendekatan psikologis dan simulasi konflik tampaknya membantu pasangan menghadapi tantangan rumah tangga. Efektivitas program ini terlihat dari penurunan lebih tajam dalam angka perceraian di kalangan non-Muslim (21,4%), yang mungkin mencerminkan keberhasilan adaptasi pendekatan multietnis dalam program ini. Program konseling di Malaysia efektif tidak hanya dalam meningkatkan stabilitas pernikahan tetapi juga dalam mendorong komunikasi yang lebih baik antara pasangan.

Indonesia mencatat 408.347 kasus perceraian, angka yang masih cukup tinggi. Penyebab utamanya adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (251.828 kasus) serta faktor ekonomi (108.488 kasus). Program konseling pra-

nikah di Indonesia cenderung lebih instruktif dan berfokus pada pendidikan agama, yang meskipun efektif dalam membangun fondasi pernikahan, kurang berhasil dalam menangani konflik rumah tangga yang spesifik. Meskipun angka perceraian secara umum menunjukkan penurunan di kalangan Muslim, usia median perceraian tetap stabil (38 tahun untuk pria dan 35 tahun untuk wanita), menunjukkan bahwa tantangan sosial dan ekonomi masih menjadi faktor utama dalam stabilitas pernikahan. Program ini perlu ditingkatkan dengan elemen interaktif seperti simulasi konflik untuk lebih efektif menangani masalah yang dihadapi pasangan.

Penelitian menunjukkan bahwa program konseling pra-nikah di Indonesia efektif dalam menurunkan angka perceraian secara umum. Program ini membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab mereka, yang berkontribusi pada stabilitas rumah tangga. Namun, karena kurangnya fokus pada konflik rumah tangga, dampaknya terhadap hubungan interpersonal pasangan belum signifikan. Malaysia berhasil meningkatkan kepuasan pernikahan melalui pendekatan psikologis yang kuat. Pasangan yang mengikuti konseling pra-nikah melaporkan tingkat konflik yang lebih rendah dan hubungan yang lebih harmonis. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas metode interaktif dan pendekatan multikultural yang diterapkan dalam program ini. UEA menunjukkan hasil yang sangat positif dalam menurunkan tingkat perceraian. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dengan elemen psikologi modern, program konseling di negara ini membantu pasangan memahami ekspektasi pernikahan dan menyelesaikan konflik secara efektif. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan pasangan untuk membangun hubungan yang stabil dan harmonis.

## **KESIMPULAN**

Program konseling pra-nikah di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan efektivitas yang beragam dalam mengurangi konflik rumah tangga, tergantung pada pendekatan dan implementasinya. Di Indonesia, program seperti Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah fokus pada nilai-nilai agama dan edukasi dasar pernikahan. Meskipun membantu membangun fondasi rumah tangga, efektivitasnya terbatas dalam menangani konflik spesifik, terlihat dari angka perceraian yang masih tinggi. Malaysia memiliki pendekatan yang lebih holistik, memadukan aspek psikologis, simulasi konflik, dan konseling berbasis agama. Program ini diwajibkan pemerintah, menghasilkan penurunan angka perceraian yang signifikan, khususnya di kalangan populasi Muslim dan multietnis. Keberhasilannya mencerminkan adaptasi metode yang efektif untuk stabilitas rumah tangga. Di UEA, program menekankan nilai budaya lokal dan pembagian peran gender, efektif untuk pasangan Emirati. Namun, angka perceraian tinggi di kalangan ekspatriat menunjukkan perlunya adaptasi program untuk keberagaman budaya. Konseling pra-nikah di Malaysia paling efektif, sementara Indonesia dan UEA menunjukkan keberhasilan terbatas sesuai konteks masing-masing. Pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program di berbagai negara.

## **REFERENCES**

Ahmed Hassan, Basma Abdo, and Soad Sayed Elkhateeb. 2024. "Assessment of

- Students' Knowledge and Attitude Regarding Premarital Examination at Aswan University." *Assiut Scientific Nursing Journal* 12(46): 73–84.
- Al-Darmaki, Fatima R. 2005. "Counseling Self-Efficacy and Its Relationship to Anxiety and Problem-Solving in United Arab Emirates." *International Journal for the Advancement of Counselling* 27: 323–35.
- . 2012. "Relationships between Career Counseling Attitudes and Self-Esteem and Self-Efficacy among Emirati University Students." *Journal of Career Development* 39(2): 143–61.
- Arif, M et al. 2024. "PSYCHOLOGICAL SKILL ASSISTANCE FOR MARRIED COUPLES WHO ARE ALUMNI OF PRE-MARITAL COURSES AT BP4-PARIAMAN CITY." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 10(1): 48–60.
- Brinson, Jesse A, and Fatima Salem Saeed Al-amri. 2005. "Students' Perceptions of Mental Health Counseling in the United Arab Emirates (UAE)." *International Journal for the Advancement of Counselling* 27: 495–512.
- Firmansyah, Mohammad Arjati. 2024. "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHAMAH (Studi Di KUA Kec. Wonosalam Kab. Jombang)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2(4): 1043–52.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip et al. 2024. "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4(2).
- Heath, Patrick J, David L Vogel, and Fatima R Al-Darmaki. 2016. "Help-Seeking Attitudes of United Arab Emirates Students: Examining Loss of Face, Stigma, and Self-Disclosure." *The Counseling Psychologist* 44(3): 331–52.
- Iskandar, Zakyyah. 2017. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10(1): 85–98.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, and Harapandi Dahri. 2022. "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia." *al-Ahkam* 32(1): 41–64.
- MALAYSIA, MONTHLY MANUFACTURING STATISTICS. 2014. "Department of Statistics, Malaysia." *Change* 2015.
- Nopilia, Leni, and Imam Kurnianto. 2022. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Dengan Metode Root Cause Analysis." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 1(1).
- Novalia, Sisca, Khairuddin Khairuddin, and Zuhraini Zuhraini. 2021. "Relevansi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kemenag Bandar Lampung." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3(2): 222–43.
- Othman, Nur Shahira, Aini Azeqa Ma'rof, Haslinda Abdullah, and Mohd Shahrul. 2023. "The Preventive Measures, Main Challenges and The Effectiveness of The Programs Developed in Dealing with Out-Of-Wedlock Pregnancies among Adolescents and Youths in Malaysia."
- Putri, Jessica Amanda, Jarnawi Jarnawi, and Reza Muttaqin Reza Muttaqin. 2024. "Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah." *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3(1): 113–25.
- Ramadhani, Rika, and Lilik Andaryuni. 2024. "Pembaharuan Hukum Keluarga

- Islam Kontemporer Di Indonesia: Aturan Batas Usia Nikah Oleh Lembaga Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam." *Bulletin of Community Engagement* 4(3): 644–51.
- Sa'adah, Mazro'atus, M Atho'Mudzhar, Abdul Gani Abdullah, and Zaitunah Subhan. 2024. "From Financial to Moral-Ethical Concerns: Changing Pattern of Divorce Reasons at the Religious Court of Bekasi, Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 14(2): 142–70.
- Tam, Cai-Lian, Teck-Heang Lee, Yie-Chu Foo, and Yet-Mee Lim. 2011. "Communication Skills, Conflict Tactics and Mental Health: A Study of Married and Cohabiting Couples in Malaysia." *Asian social science* 7(6): 79–87.
- Wardani, Desy Ayu, Siti Khuzaimah Ahmad Sharoni, and Endang Triyanto. 2024. "Efficacy of Programs Designed to Reduce the Incidence of Premarital Sexual Behavior Among Adolescents: A Systematic Review." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 27(1): 25–35.
- Ziadah, Rafeef. 2024. "Surveillance, Race, and Social Sorting in the United Arab Emirates." *Politics* 44(4): 605–20.